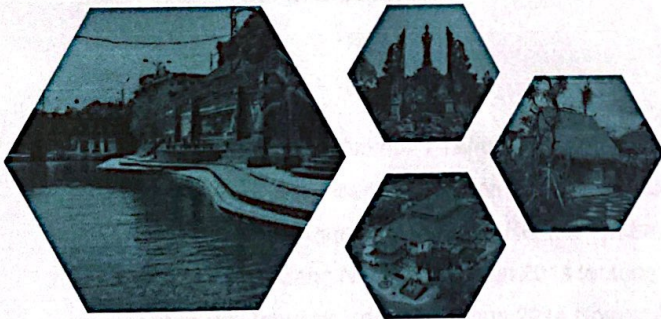




PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN II



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK , PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Gatot Subroto VI J Denpasar Kode Pos : 80237 Telepon/Fax : (0361) 428380
www.denpasarkota.go.id email : kb.denpasarkota@gmail.com

**Laporan Triwulan II Pengelolaan Risiko
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar Tahun 2023**

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengelolaan risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Pengelolaan risiko dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah merupakan Unit Pemilik Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 26 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 26 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko (15,38% dari 26 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 4 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas).
- c. Sebanyak 4 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 4 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan II

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada Triwulan II sebanyak 2 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Triwulan II sebanyak 2 kegiatan atau 100% dari 2 kegiatan pengendalian pada Triwulan II. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah pada Triwulan II.

BAB IV

Monitoring Risiko dan RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada Triwulan II. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB V

Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Triwulan II dapat dilihat bahwa tidak terdapat risiko yang muncul pada Triwulan II.

Analisis manajemen risiko harus dilaksanakan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Denpasar, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra I Gusti Ayu Sri Wetrawati, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311199503 2 001

Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Risiko TW II Tahun 2023

1. Pembinaan PKB/ PLKB

Hari/ tanggal : Jumat 4 Mei 2023
Tempat : Balai Penyuluh KB
Peserta : BKKBN Perwakilan Provinsi Bali, Bidang Dalduk, PKB dan PLKB



2. Orientasi Tribina Kader Ketahanan Keluarga

Tanggal : 17 Mei 2023
Tempat : Santi Graha
Peserta : Kader Ketahanan keluarga



Tanggal : 19 Mei 2023
Tempat : Santi Graha
Peserta : Kader Ketahanan keluarga



Tanggal : 22 Mei 2023
Tempat : Santi Graha
Peserta : Kader Ketahanan keluarga



Tanggal : 29 Mei 2023
Tempat : Santi Graha
Peserta : Kader Ketahanan keluarga



3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan melalui Rapat Rutin

Tanggal : 17 Mei 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
Peserta : ASN di Lingkungan DP3AP2KB



FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2023				
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Strategis OPD				
1	Keterlambatan dalam pengumpulan GAP dan GBS	RSO.23.08.13.01	4	3	12
2	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	RSO.23.08.13.02	3	3	9
	Risiko Operasional OPD				
3	Kekurangan Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan karena adanya mutasi masuk pegawai	ROO.23.08.13.01	2	1	2
4	Serapan anggaran tidak optimal	ROO.23.08.13.02	2	1	2
5	Penyusunan anggaran barang milik daerah belum sesuai dengan Rencana Kebutuhan BMD	ROO.23.08.13.03	3	3	9
6	Penyerapan belanja jasa telepon tidak optimal	ROO.23.08.13.04	2	1	2
7	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.23.08.13.05	3	3	9
8	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.06	2	4	8
9	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.07	2	5	10
10	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.08	2	4	8
11	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO.23.08.13.09	2	4	8
12	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.23.08.13.10	2	3	6
13	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.23.08.13.11	4	4	16
14	Sulit mengundang kader sebagai peserta	ROO.23.08.13.12	2	4	8
15	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.23.08.13.13	2	4	8
16	Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan sekolah	ROO.23.08.13.14	2	4	8
17	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.15	2	5	10
18	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.16	2	4	8
19	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.17	2	4	8
20	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.18	4	2	8
21	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.19	4	5	20
22	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO.23.08.13.20	4	5	20
23	Alat kontrasepsi expired	ROO.23.08.13.21	5	2	10
24	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.22	4	2	8
25	Peserta belum paham dengan tugas	ROO.23.08.13.23	4	4	16
26	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.23.08.13.24	4	2	8

Denpasar, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


 Dra. Gusti Agung Sri Wahawati, M. Si
 Pembina Bidang Muda
 NIK: 196603111995032001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Operasional						
1	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.23.08.13.11	16	Kabid KHPKKDI	Pengumpulan data dari stake holder terkait, kurang tepat waktu	Proses penyusunan buku profil statistik gender terhambat
2	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.19	20	Kabid Dalduk	Kurang tenaga penggerak desa bagi desa yang tidak memiliki PKB/PLKB (Sesuai Juknis BOKB tahun 2023)	Kurang optimal penyerapan dana BOKB
3	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO.23.08.13.20	20	Kabid KBKKK	Kurang koordinasi antara faskes dan Dinas	Distribusi Alkon ke faskes terhambat, pelayanan KB tertunda
4	Peserta belum paham dengan tugas	ROO.23.08.13.23	16	Kabid KBKKK	Peserta dari berbagai bidang ilmu sehingga pemahaman dalam menyikapi maksud dan tujuan kregaitan belum dipahami	Target kegiatan tidak terpenuhi

Denpasar, 20 Juli 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		2023					
Tujuan Strategis		(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penangggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
II Risiko Operasional							
1	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.23.08.13.11	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dengan penyedia jasa dan stakholder terkait	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Kabid IG-PPKDI	TW I & TW III
2	Realisasi tidak maksimal	ROO.23.08.13.19	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKGBN Provinsi	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKGBN Provinsi	Kabid Daiduk	TW I, TW II, TW III
3	Data Hasil Pelayanan Belum diinput dalam aplikasi	ROO.23.08.13.20	Koordinasi dengan faskes dan penginputan rutin dalam	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Kabid KBKKK	TW III
4	Peserta belum paham dengan tugas	ROO.23.08.13.23	Rapat Rutin dengan PKB dan PLKB	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan Keluarga	Kabid KBKKK	TW II



 Denpasar, 23 Agustus 2023
 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Pemerintah Kota Denpasar
 Dra I Gusti Agung Sri Wetravati, M. Si
 Pemangku Utama Muda
 (9020311.199503.2.001)

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Rapat koordinasi, sosialisasi data terpilah	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	OPD yang memiliki data dalam Profil Statistik Gender	TW I dan TW III	TW I (28 Maret 2023)	Telah terlaksana pada TW I
2	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Rapat koordinasi	BKKBN Provinsi Bali	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	TW I, TW II, TW III	TW I (10 Maret 2023); TW II (4 Mei 2023)	Pembinaan PKB/ PLKB
3	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Pelatihan Tenaga Medis	Tenaga Medis berpengalaman	Tenaga medis yang melaksanakan pelayanan di faskes	TW III	-	Dilaksanakan pada TW III
4	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan	Dinas P3AP2KB Kota Denpasar	Kader kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	TW II	TW II (17, 19, 22, 29 Mei 2023)	Orientasi Tribina

Denpasar, 3 Juli 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
Dra. Susi Agung Sri Wetrawati, M. Si
Pembina Utama Muda
WP. 1062011 199503 2 001

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Statistik Gender	Evaluasi melalui rapat rutin	Kepala Dinas P3AP2KB	TW I dan TW III	TW I (28 Maret 2023)	Telah terlaksana pada TW I melalui rapat rutin
2	Berkoordinasi mengenai Juknis BOKB Tahun 2023 ke BKKBN Provinsi	Evaluasi melalui rapat rutin	Kepala Dinas P3AP2KB	TW I, TW II, TW III	TW I (10 Maret 2023); TW II (17 Mei 2023)	Telah terlaksana pada TW II melalui rapat rutin
3	Perencanaan Pelatihan Tenaga medis	Evaluasi pelatihan	Kepala Dinas P3AP2KB	TW III	-	Dilaksanakan pada TW III
4	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan Keluarga	Evaluasi pelatihan	Kepala Dinas P3AP2KB	TW II	TW II	Telah terlaksana pada TW II melalui rapat rutin dan dituangkan dalam laporan kegiatan

Denpasar, 30 Juni 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. Gusti Agung Sri Wicakanti, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur
 Urusan Pemerintahan : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
2	Masalah/Risiko Baru: NIHIL									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Masalah/Risiko Baru: NIHIL									
III	Risiko Operasional OPD									
	NIHIL									
	Masalah/Risiko Baru:									
	NIHIL									

Denpasar, 3 Juli 2023
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
 DINA PERBERKORPORASI DAN PERLINDUNGAN ANAK, KESEHATAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Dra. Gusti Agung Sri Wetrwati, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19603111995032001